



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 6 Maret 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

UNIT KERJA : UNIVERSITAS HASANUDDIN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **SUHARDI**
2. Jabatan : **WAKIL DEKAN BIDANG PERENCANAAN DAN SUMBER DAYA**
3. NHK : **811394**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 3.725.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 90 m2/48 m2 di KAB / KOTA KOTA MAKASSAR , HASIL SENDIRI Rp. 415.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 189 m2/36 m2 di KAB / KOTA KOTA MAKASSAR , Rp. 215.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 156 m2/198 m2 di KAB / KOTA KOTA MAKASSAR , HASIL SENDIRI Rp. 1.200.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 90 m2/66 m2 di KAB / KOTA KOTA MAKASSAR , HASIL SENDIRI Rp. 375.000.000
5. Tanah Seluas 4.000 m2 di KAB / KOTA WAJO, HASIL SENDIRI Rp. 60.000.000
6. Tanah Seluas 5.000 m2 di KAB / KOTA BONE, HASIL SENDIRI Rp. 60.000.000
7. Tanah Seluas 439 m2 di KAB / KOTA KOTA MAKASSAR , HASIL SENDIRI Rp. 1.400.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 732.000.000**

1. MOBIL, TOYOTA AGYA Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 60.000.000
2. MOTOR, SUZUKI SMASH Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000



3. MOBIL, TOYOTA VELOZ Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 240.000.000
4. MOTOR, YAMAHA AEROX CONNECTED Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 18.000.000
5. MOTOR, YAMAHA BJ8 W A/T SOLO Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 12.000.000
6. MOTOR, YAMAHA NMAX BTE/AT Tahun 2024, HADIAH Rp. 30.000.000
7. MOBIL, HONDA HRV HONDA/MPV Tahun 2024, LAINNYA Rp. 370.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	270.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	323.872.296
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	5.050.872.296
III. HUTANG	Rp.	1.455.206.253
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	3.595.666.043

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.